

**SKRIPSI**

**FUNGSI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN  
PEMERIKSAAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA  
UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**



**AFIFAH RAHMI PUTRI**  
**1810113010**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA ( PK V )**

**Pembimbing :**

**Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H**

**Henny Adriani, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

# **FUNGSI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH**

## **ABSTRAK**

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Indonesia merupakan salah satu negara *welfare state* yang didalamnya terdapat tujuan negara untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat. Keuangan negara merupakan salah satu faktor dalam pencapaian tujuan negara. Pertanggung jawaban negara terhadap keuangan merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintah negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan negara agar masyarakat dapat hidup secara adil dan makmur. Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut dengan BPK) merupakan lembaga pengawasan keuangan yang dibentuk oleh konstitusi secara khusus untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan latar belakang penelitian maka permasalahan pada penelitian ini adalah, *pertama* bagaimana fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, *kedua* apakah status Wajar Tanpa Pengecualian (selanjutnya disingkat menjadi WTP) yang dikeluarkan BPK terhadap hasil pemeriksaan sudah memperhitungkan pengelolaan keuangan dari perspektif pengelolaan keuangan yang anti korupsi. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif. penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dari pertanyaan yang diteliti maka hasil yang ditemukan yaitu, *pertama* fungsi BPK selaku yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara berperan penting untuk memeriksa jika telah terjadi penyimpangan dana yang merugikan keuangan negara yang disebut dengan Tindak Pidana Korupsi. *Kedua* penting juga dicatat bahwa perolehan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan tidak menjamin satu daerah bebas dari korupsi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya dapat dilihat bahwa pemberian status WTP ini tidak sesuai dengan pengelolaan keuangan Negara yang anti korupsi.

**Kata Kunci : Badan Pemeriksa Keuangan, Pengelolaan Keuangan Negara, Pemerintahan yang Baik dan Bersih.**